



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
68 TAHUN 2022 TENTANG PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengakibatkan beberapa keanggotaan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 68 Tahun 2022 mengalami perubahan jabatan dan/atau unit kerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 68 Tahun 2022 tentang Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG

PANITIA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Lampiran Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 68 Tahun 2022 tentang Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan seleksi PPPK di lingkungan Kemen PPPA Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 68 TAHUN 2022  
TENTANG PANITIA SELEKSI PENGADAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2022

PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
I	Ketua:	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian
II	Wakil Ketua	Rini Handayani	Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
III	Sekretaris:	Elita	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	Anggota Kesekretariatan:	1. Dian Rahmawati	Analisis Kepegawaian Ahli Madya
		2. Prasetyatiningsih	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		3. Yudith Restia Friosia	Analisis Pengembangan Kompetensi
IV	Tim Seleksi Administrasi		
	Koordinator:	Tri Hadiyanto Wibowo	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
		1. Bella Riyanti	Analisis Kinerja
		2. Fransisca Ulyna Rahma	Analisis Pengembangan Kompetensi
3. Nabila Nugraheni		Analisis Kinerja	
V	Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan Wawancara		
	Anggota:	1. Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
		2. Lies Rosdianty	Kepala Biro Data dan Informasi
		3. Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		4. Budi Mardaya	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender
		5. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya
		6. Dermawan	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum
		7. Dyah Elvina	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		8. Ali Khasan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
		9. Eni Widiyanti	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan
		10. Prijadi Santoso	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
		11. Valentina Gintings	Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
		12. Ambarwati	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		13. Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
		14. Elvi Hendrani	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		15. Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
		16. Atwirlany Ritonga	Plt. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
		17. Maydian Werdiastuti	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		18. Fatahillah	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		19.Rr. Endah Sri Rejeki	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
		20.Rohika Kurniadi Sari	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
		21.Anggin Nuzula Rahma	Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
		22.Dewi Respatiningsih	Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
VI	Tim Pemantauan Ujian		
	Koordinator:	Fakih Usman	Inspektur
	Anggota:	1. Sandi Tri Leksono	Auditor Ahli Madya
		2. Devy Nia Pradhika	Auditor Ahli Madya

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓